



PROGRAM STRATEGIS DAN CAPAIAN DISKUK JABAR 2026

Yuke Mauliani Septina, S.T., M.Si.
Kepala Dinas



Bandung, 11 Agustus 2026





GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL

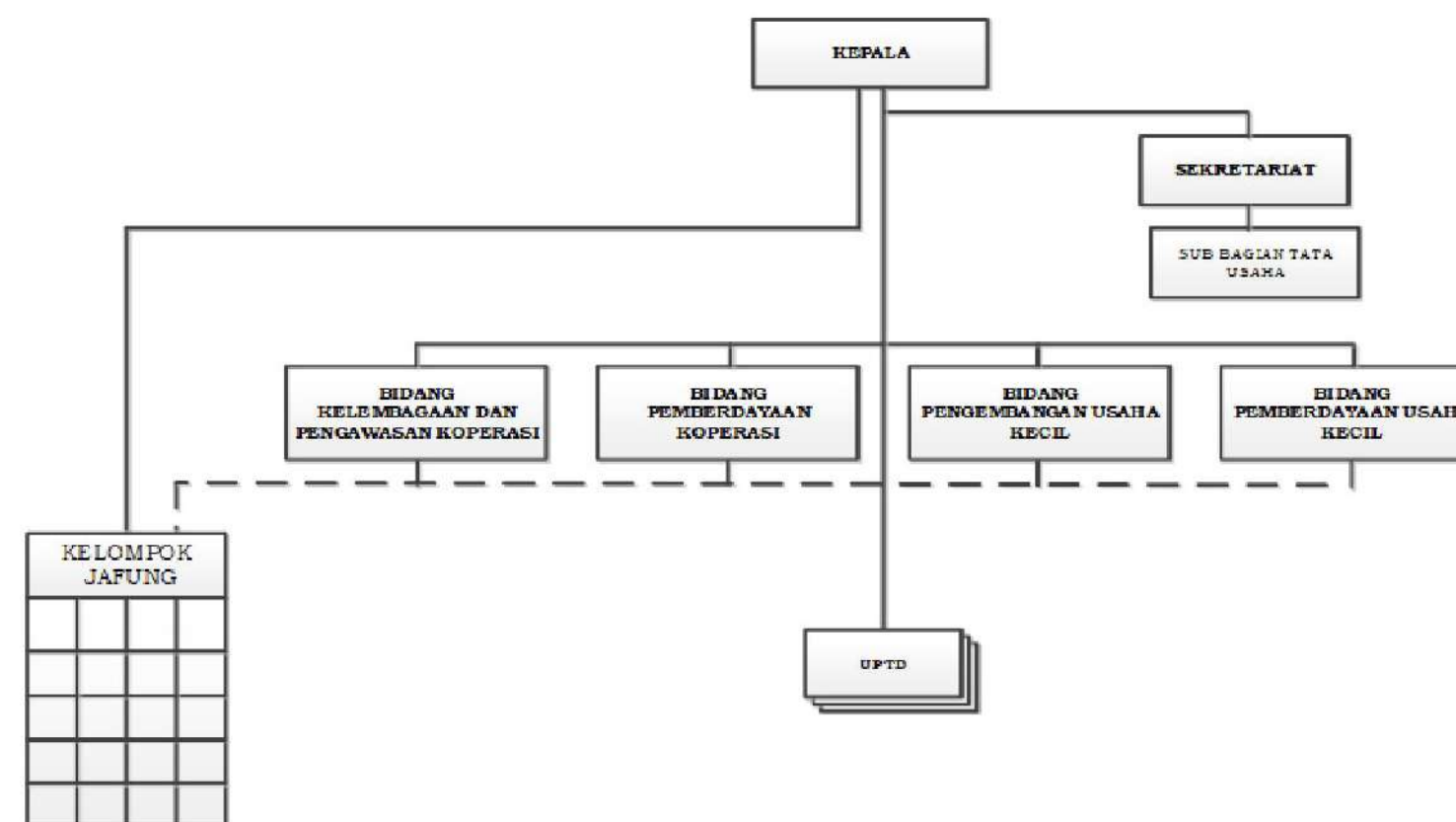
TUGAS POKOK

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil, meliputi kelembagaan koperasi, pemberdayaan koperasi, usaha kecil, serta pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

FUNGSI

- ➡ Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Kecil yang menjadi kewenangan Provinsi;
- ➡ Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Kecil yang menjadi kewenangan Provinsi;
- ➡ Penguatan administrasi Dinas;
- ➡ Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- ➡ Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI



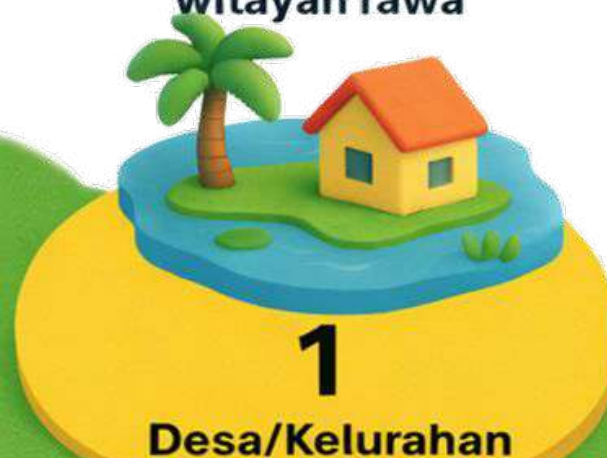
POTRET DAN POSISI JAWA BARAT

Kilas Demografi, Geografi, dan Indikator Makro di Jawa Barat

Desa/Kelurahan terletak di
wilayah dataran rendah



Desa/Kelurahan terletak di
wilayah rawa



Desa/Kelurahan terletak
wilayah kepulauan



Desa/Kelurahan terletak di
wilayah pesisir



Desa/Kelurahan terletak di
wilayah pegunungan



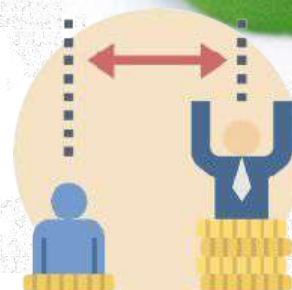
Penduduk
50.759.003 JIWA



**Pertumbuhan
Ekonomi**
5,79%
(TW I/2026)



Koperasi dan UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi lokal, perluasan pasar, dan penguatan kapasitas usaha kecil.



Indeks Gini
0,416
(Maret 2025)

**Peran Koperasi dan
UMKM** membantu menurunkan kesenjangan pendapatan dengan memperluas akses ekonomi bagi pelaku usaha dan rumah tangga berpenghasilan rendah.



IPM
75,9
(November 2025)

**Penguatan
koperasi dan
UMKM** berkontribusi pada peningkatan IPM melalui peningkatan pendapatan, pendidikan, dan akses layanan dasar masyarakat.

Arah Intervensi Penguatan Koperasi & UMKM



Tingkat Kemiskinan
7,02%
(Maret 2025)
Penduduk Miskin
3,65 juta jiwa
(Maret 2025)

Koperasi dan UMKM berperan dalam **menekan kemiskinan** melalui penguatan usaha kecil, perluasan akses pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk, serta pembukaan peluang pendapatan bagi rumah tangga.

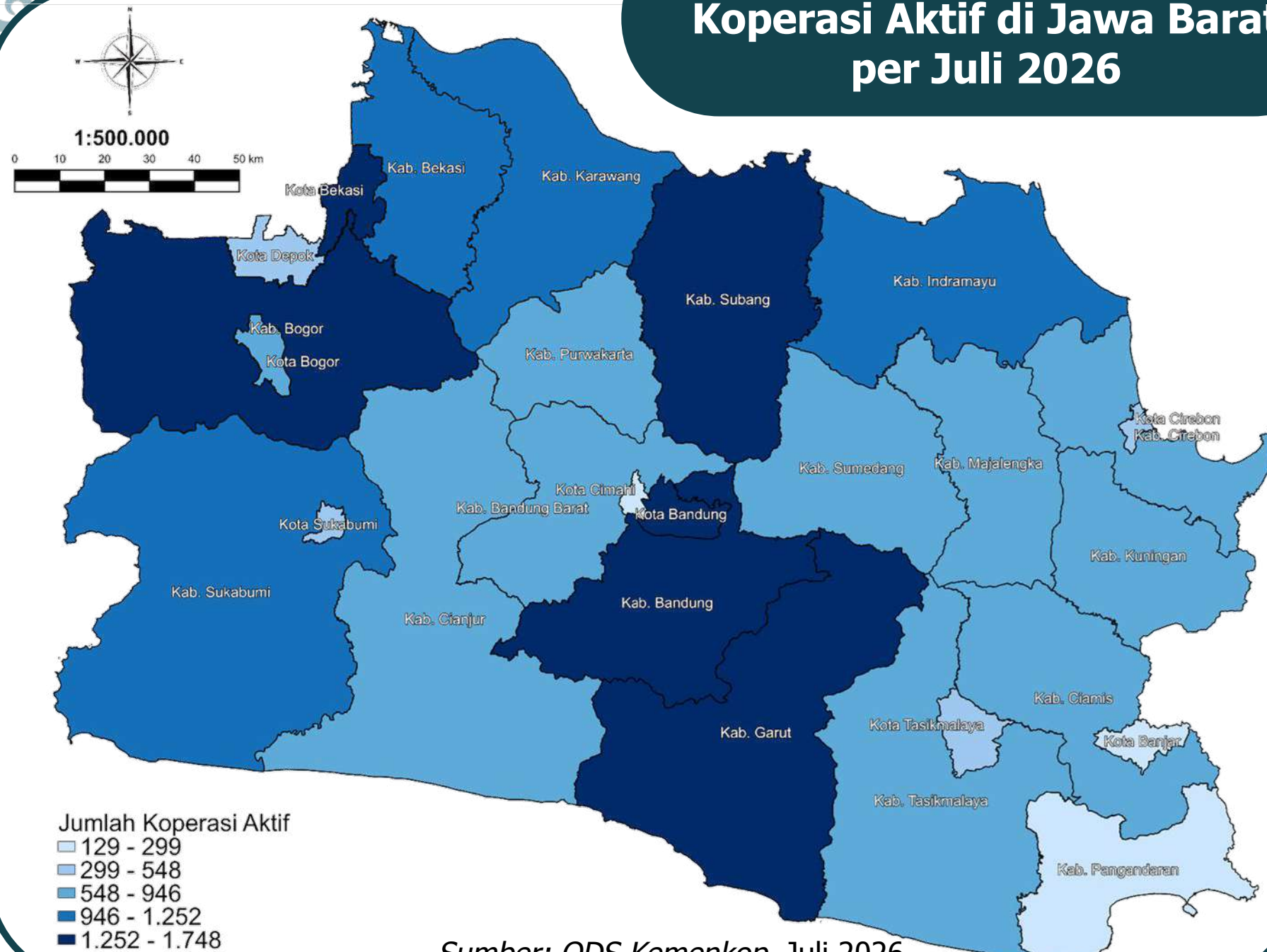


**Tingkat
Pengangguran Terbuka**
6,64%
(Februari 2026)
Penduduk Menganggur
1,79 juta jiwa
(Februari 2026)

Penguatan koperasi dan UMKM dapat **menekan tingkat pengangguran** melalui penciptaan lapangan kerja lokal, perluasan usaha produktif, dan peningkatan penyerapan tenaga kerja masyarakat.

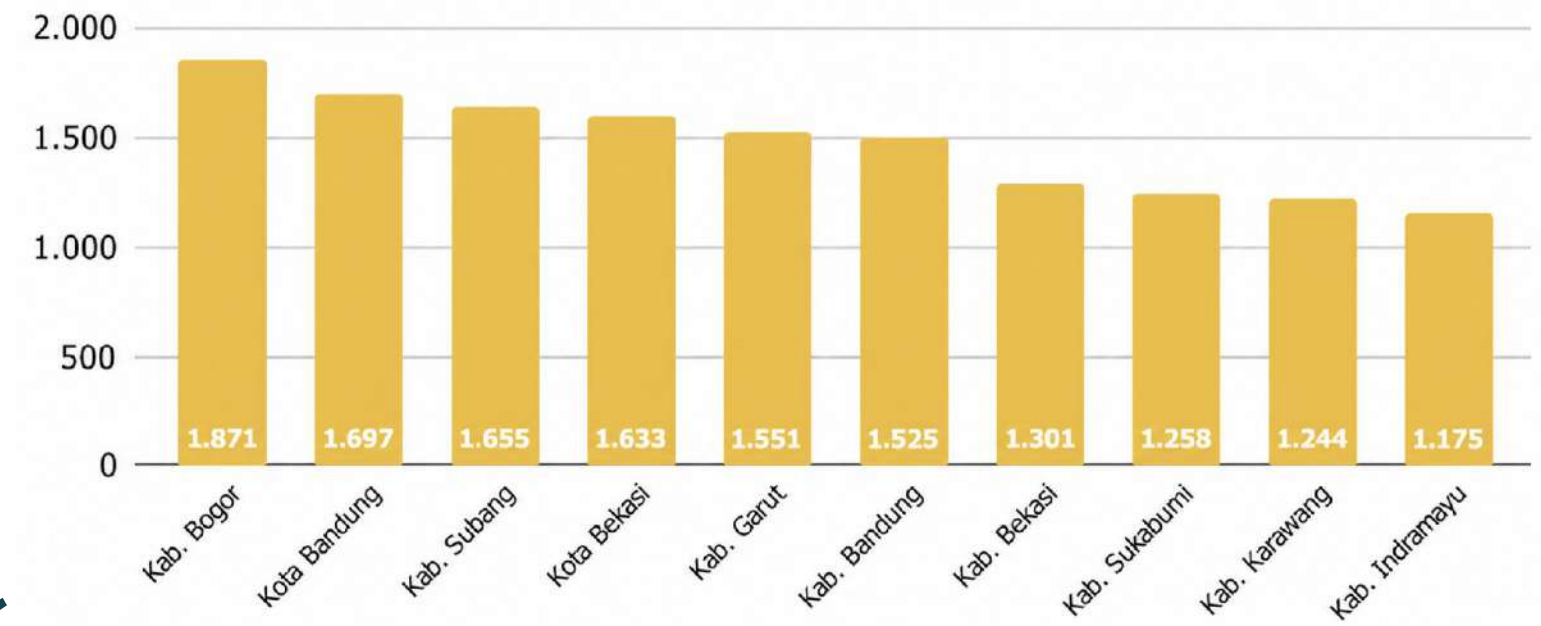
SEBARAN KOPERASI DI JAWA BARAT

Peta Sebaran Jumlah Koperasi Aktif di Jawa Barat per Juli 2026

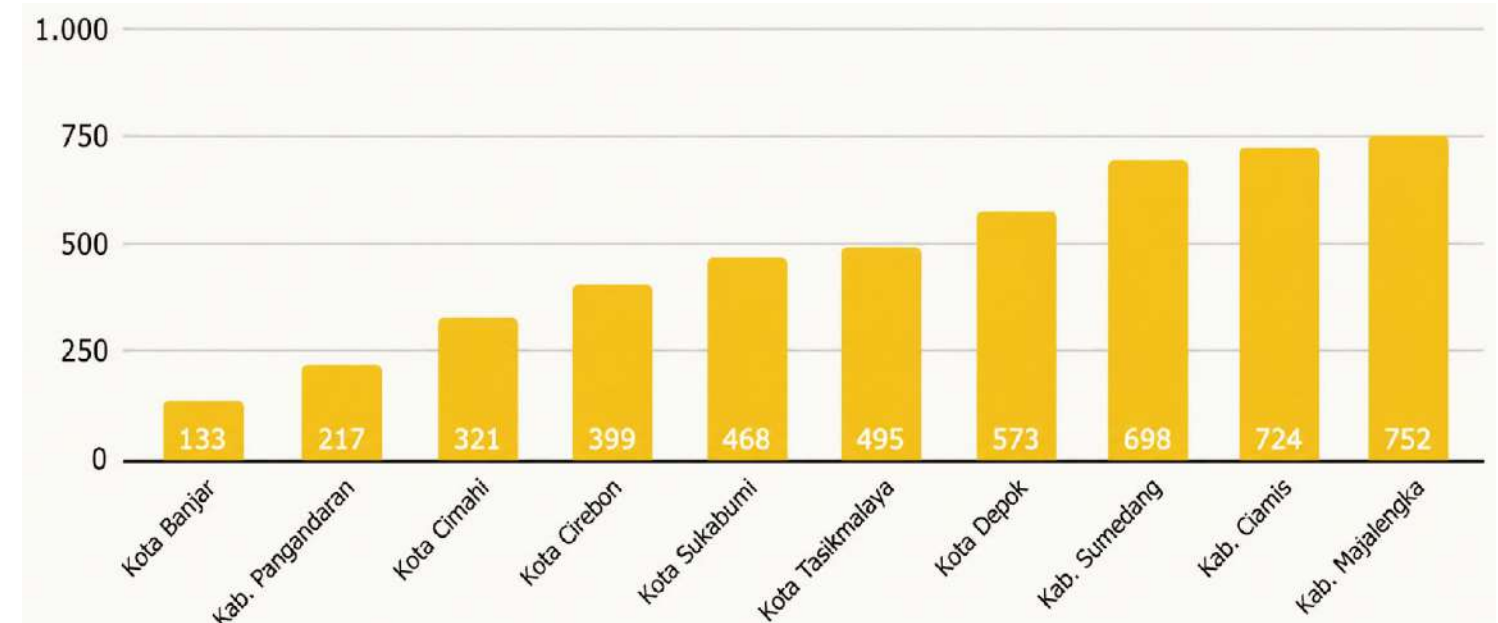


Sumber: ODS Kemenkop, Juli 2026

10 Kab/Kota dengan Jumlah Koperasi Aktif Tertinggi



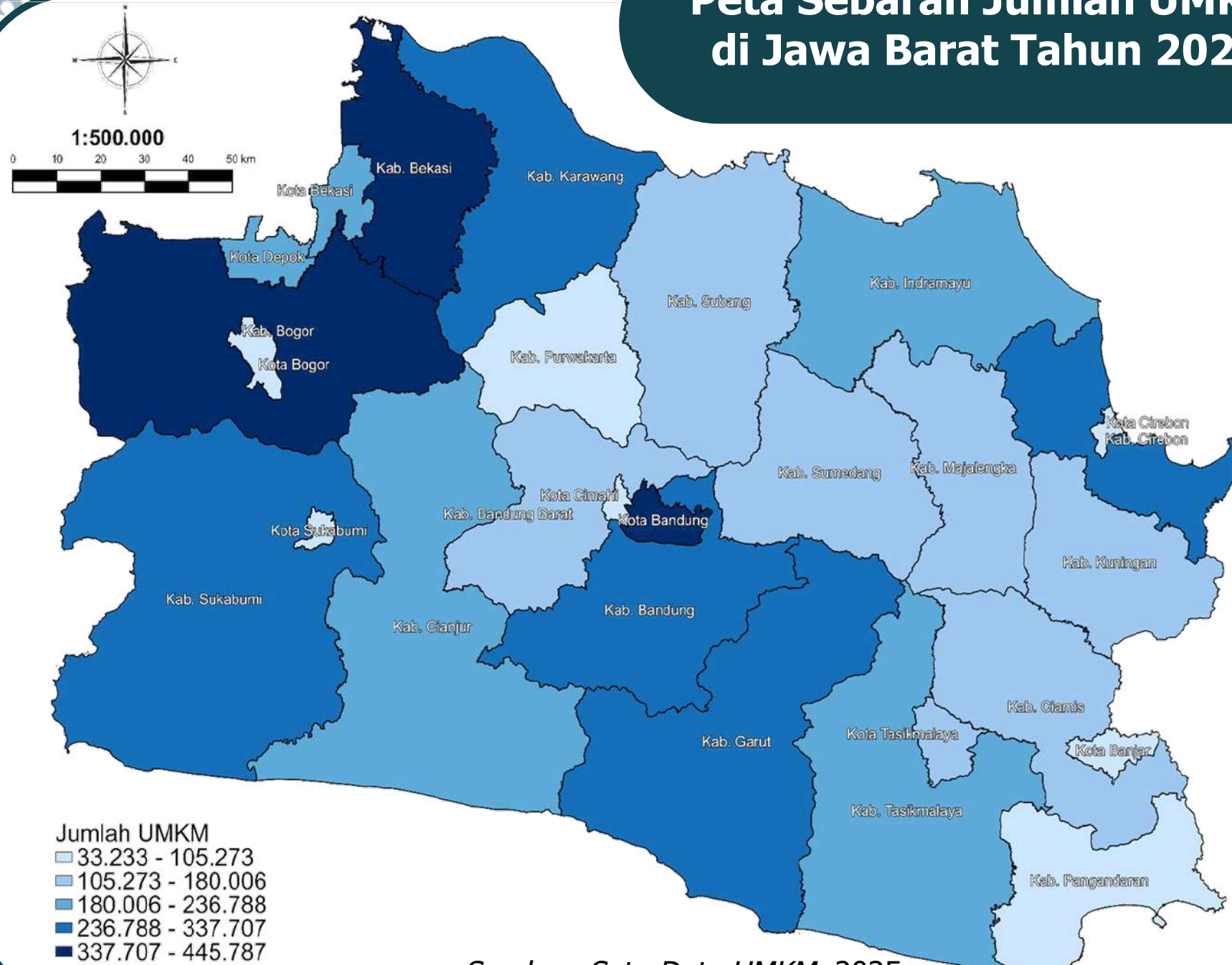
10 Kab/Kota dengan Jumlah Koperasi Aktif Terendah



Jawa Barat memiliki total koperasi aktif sebanyak **25.636 unit (11% jumlah nasional)**, merupakan **koperasi terbanyak kedua** setelah Jawa Timur.

SEBARAN UMKM DI JAWA BARAT

Peta Sebaran Jumlah UMKM di Jawa Barat Tahun 2025



Sumber: Satu Data UMKM, 2025

99,74%

USAHA MIKRO
5,4 jt unit usaha

0,21%

USAHA KECIL
11,4 rb unit usaha

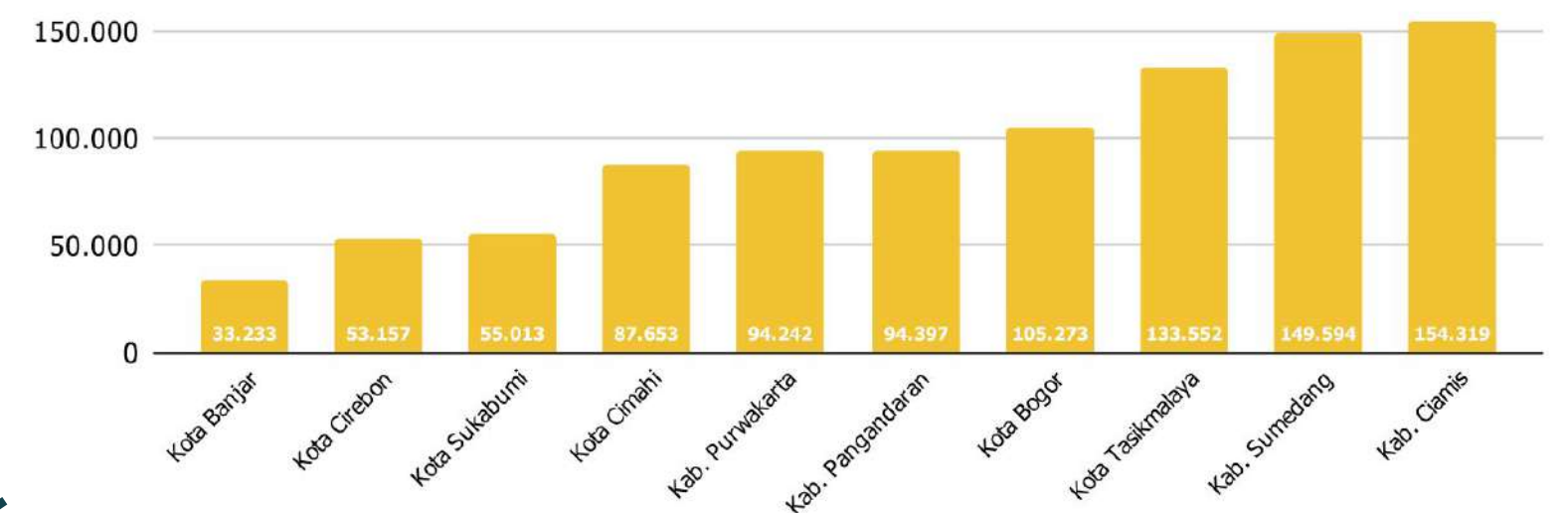
0,05%

USAHA MENENGAH
2,7 rb unit usaha

10 Kab/Kota dengan Jumlah UMKM Tertinggi



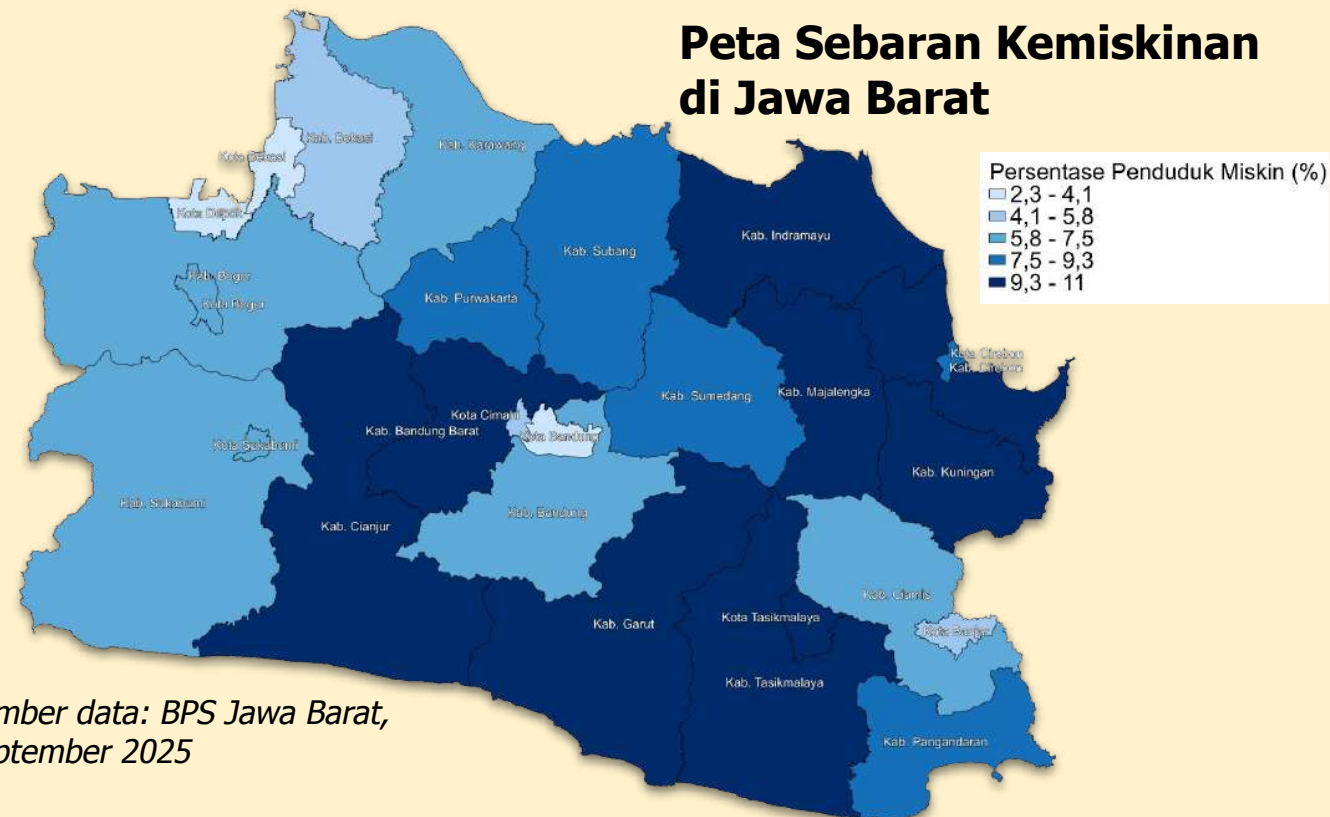
10 Kab/Kota dengan Jumlah UMKM Terendah



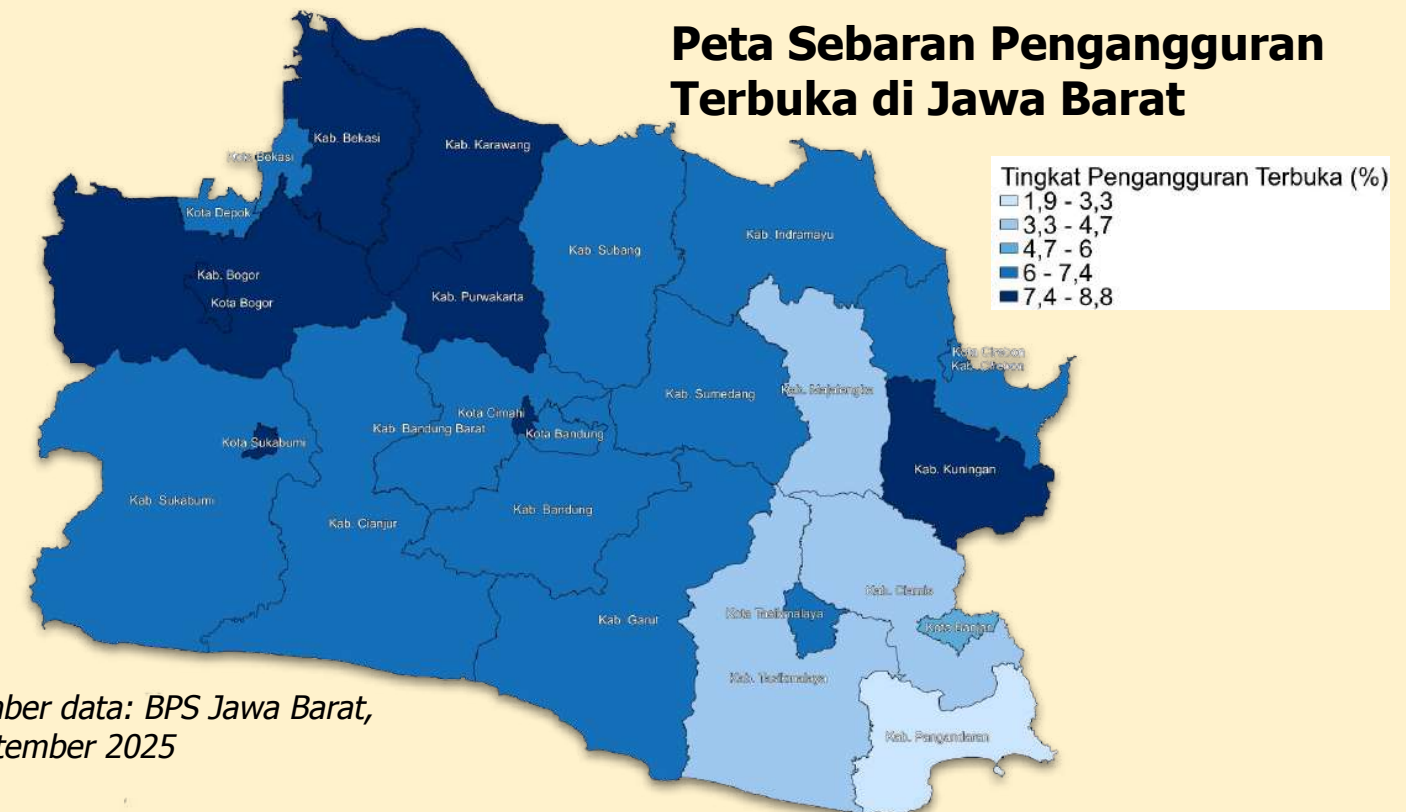
Jawa Barat memiliki sebanyak **5.429.638 UMKM** (**18% jumlah nasional**) yang merupakan **jumlah UMKM terbanyak di Indonesia.**

TINGGINYA JUMLAH **KOPERASI** TIDAK SELALU BERBANDING LURUS DENGAN KESEJAHTERAAN WILAYAH

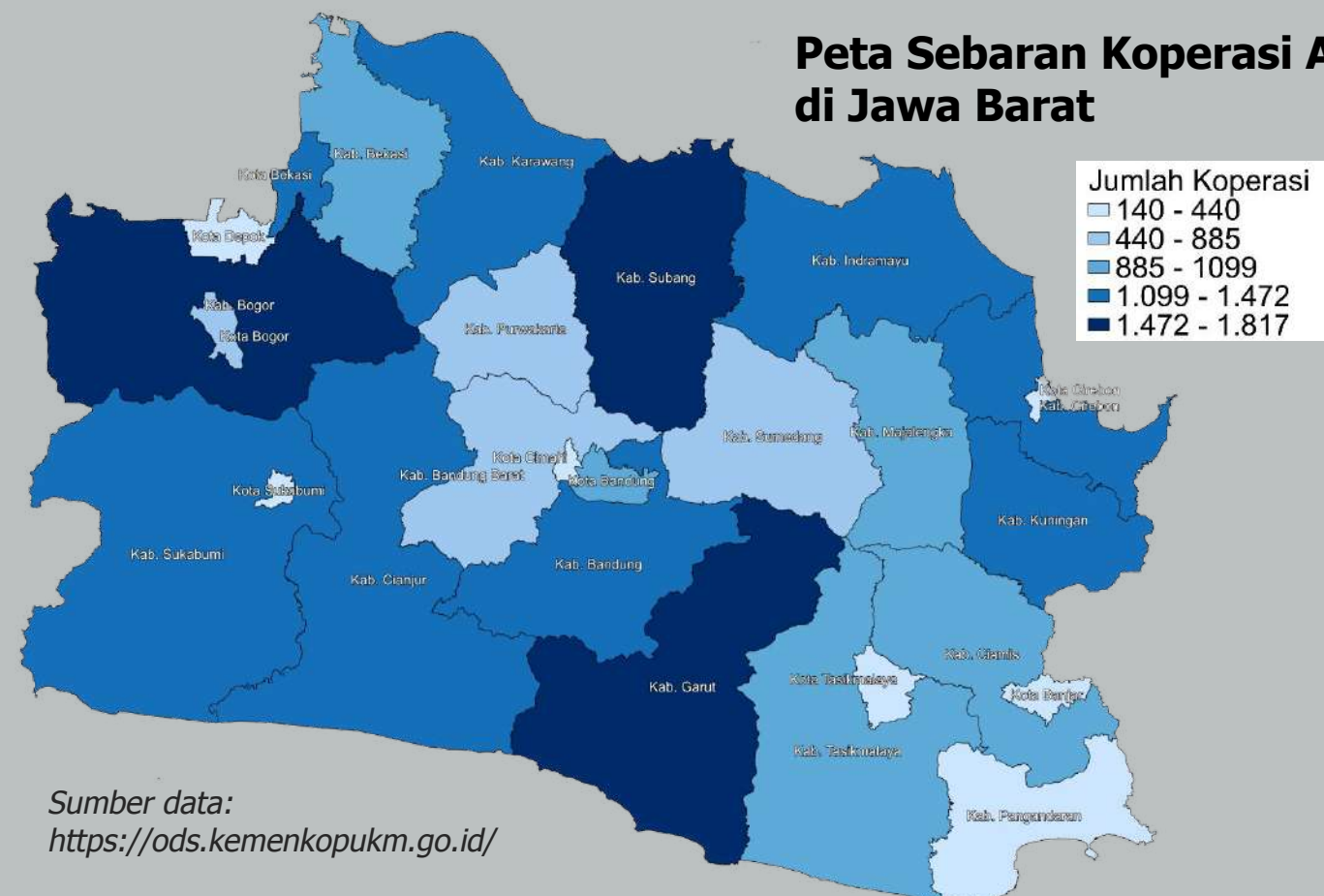
Peta Sebaran Kemiskinan di Jawa Barat



Peta Sebaran Pengangguran Terbuka di Jawa Barat



Peta Sebaran Koperasi Aktif di Jawa Barat

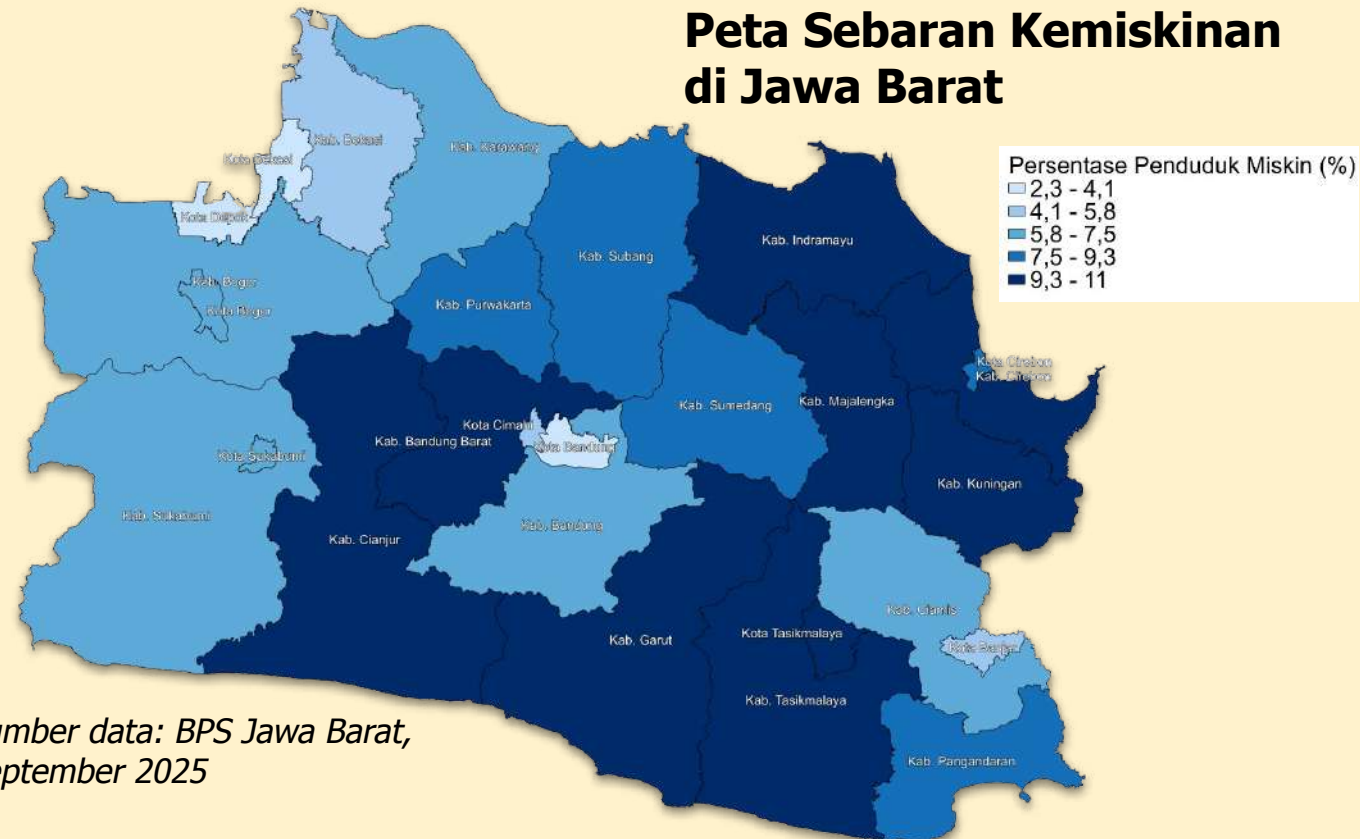


Data koperasi disandingkan dengan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka untuk melihat sejauh mana keberadaan koperasi berkorelasi dengan kondisi kesejahteraan masyarakat.

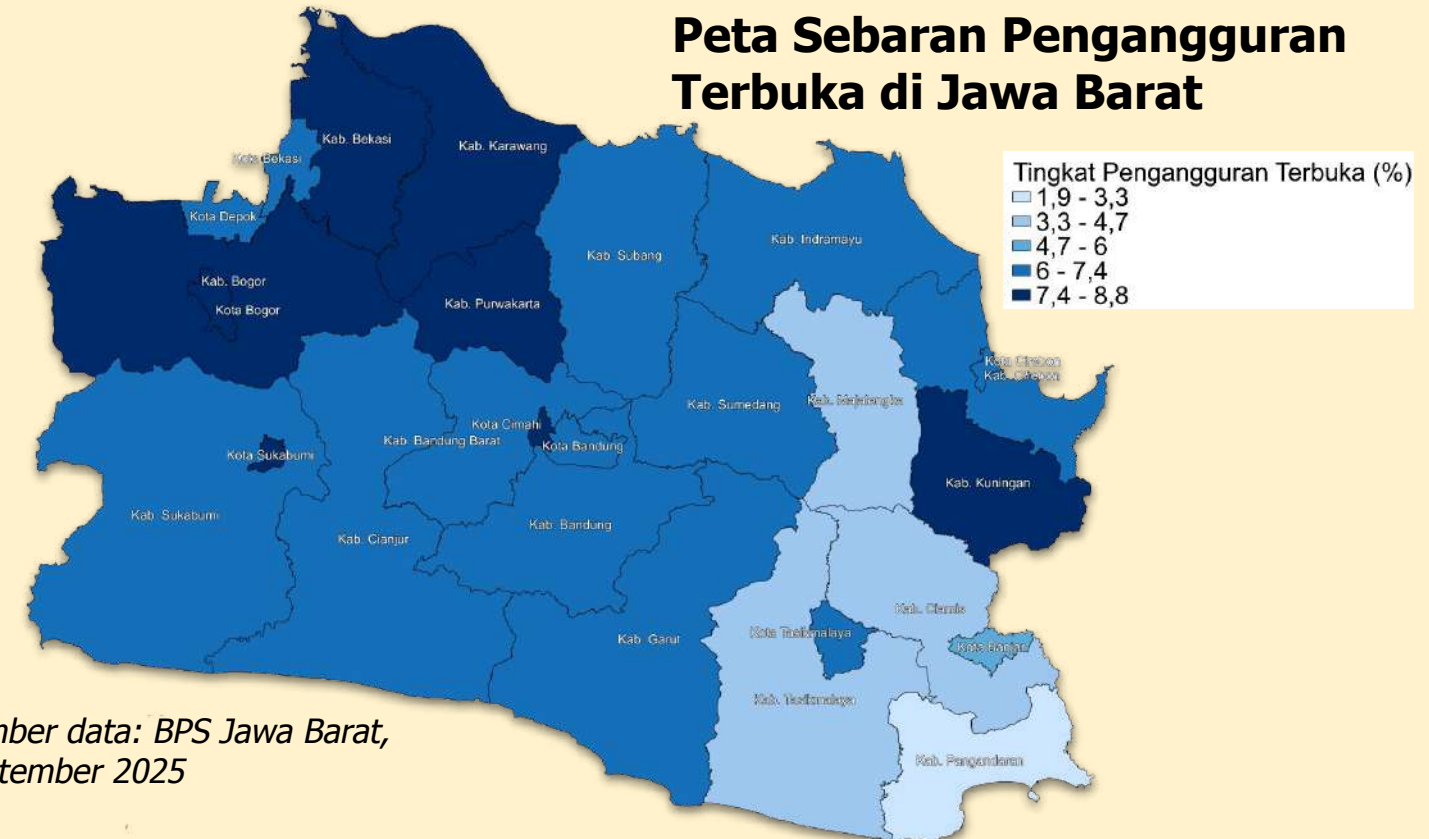
Sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota, **koperasi diharapkan mampu** memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

TINGGINYA JUMLAH UMKM TIDAK SELALU BERBANDING LURUS DENGAN KESEJAHTERAAN WILAYAH

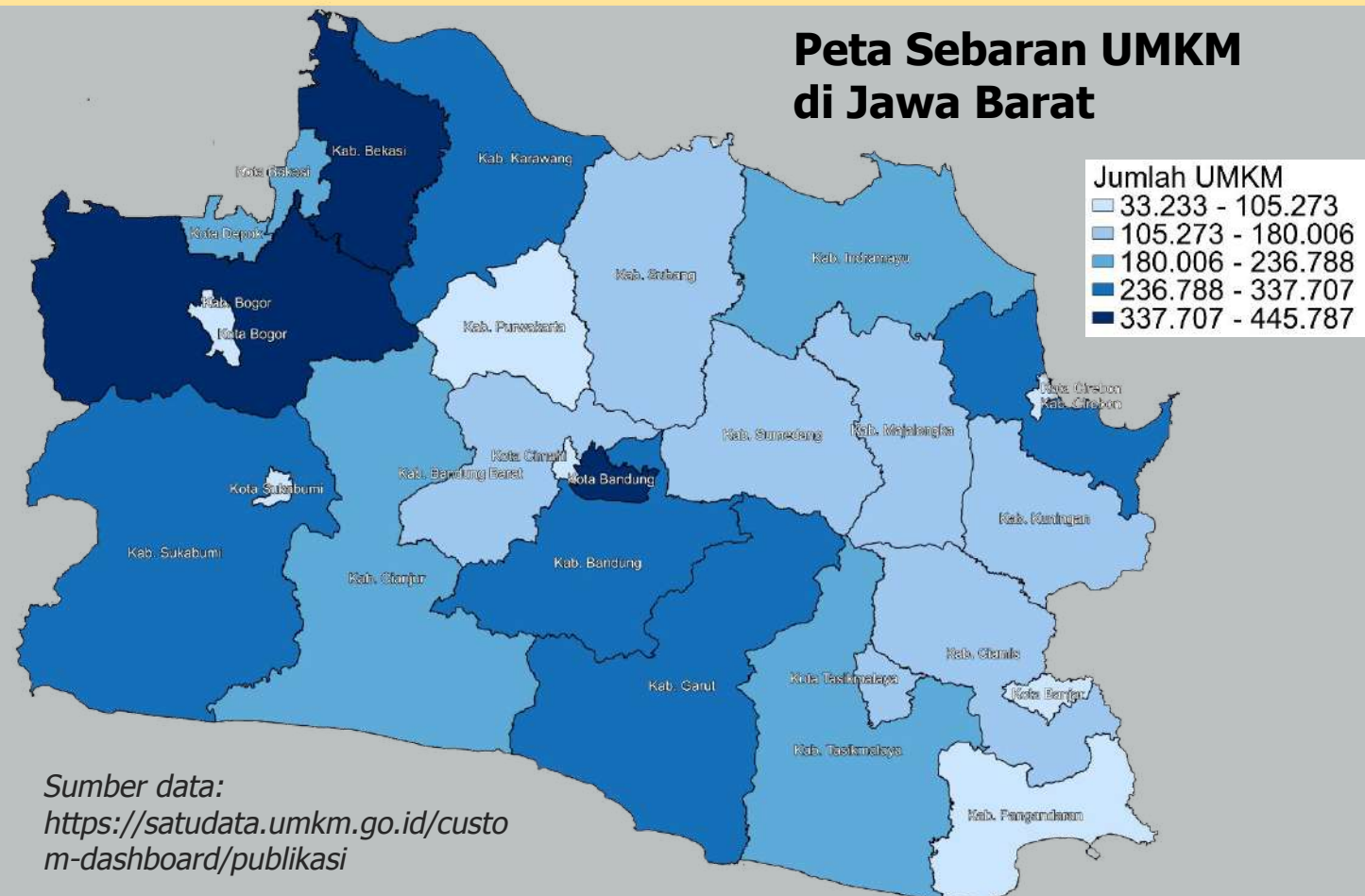
Peta Sebaran Kemiskinan di Jawa Barat



Peta Sebaran Pengangguran Terbuka di Jawa Barat



Peta Sebaran UMKM di Jawa Barat



Data UMKM disandingkan dengan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka karena **UMKM merupakan penggerak utama perekonomian daerah** yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perbandingan ini membantu mengidentifikasi apakah tingginya aktivitas UMKM telah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan wilayah.

TANTANGAN KOPERASI DAN UMKM

"Koperasi dan UMKM di Jawa Barat menghadapi tantangan struktural, kelembagaan, dan adaptif yang hanya bisa dijawab melalui transformasi menyeluruh: kelembagaan kuat, digitalisasi, kolaborasi lintas sektor, dan intervensi afirmatif untuk naik kelas dan tangguh menghadapi krisis."

Faktor Eksternal



Perubahan Tren
Konsumen Global



Disrupsi Teknologi



Ketidakpastian
Ekonomi Global



Perang Dagang dan
Proteksionisme



Perubahan Iklim



UMKM

Faktor Internal

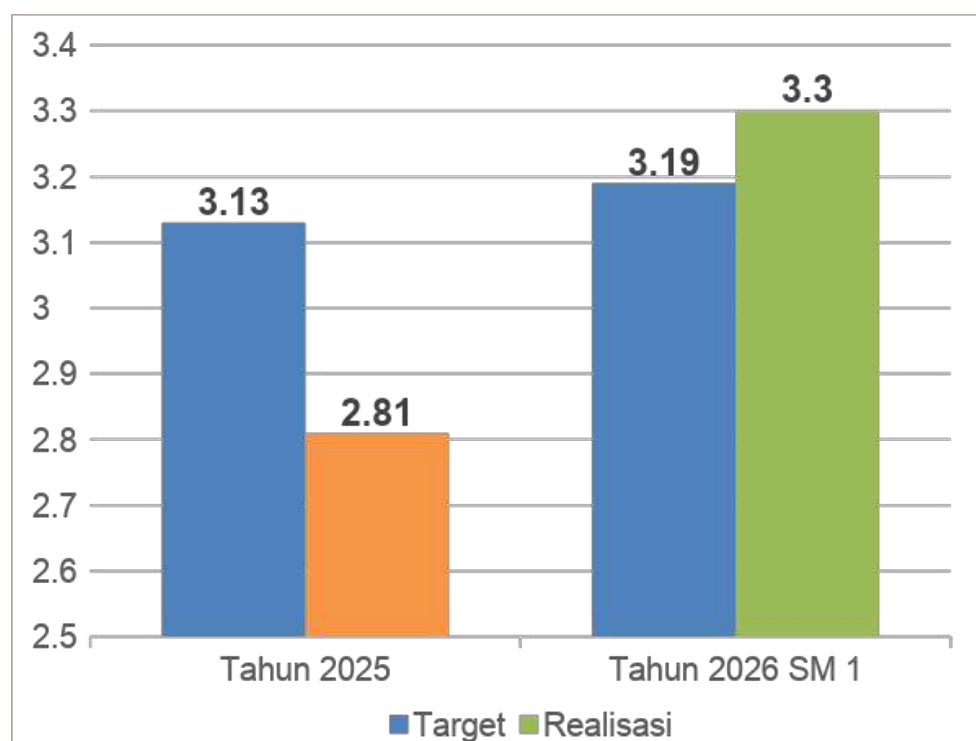
- Kapasitas inovasi dan daya saing produk masih rendah.
- Literasi digital dan kemampuan adopsi teknologi belum merata.
- Struktur usaha mayoritas mikro, informal, dan sulit naik kelas.
- Fragmentasi ekosistem pendampingan, pembiayaan, dan pemasaran.
- Regulasi dan perizinan dianggap kompleks bagi pelaku UMKM.
- Rendahnya ketahanan terhadap guncangan krisis (pandemi, inflasi, dll).

KOPERASI

- Kelembagaan lemah: Banyak koperasi tidak aktif, belum modern, dan belum memiliki unit usaha yang sehat.
- SDM pengurus s pengawas terbatas kemampuan manajerial dan finansial.
- Tata kelola belum transparan s akuntabel, rendahnya kepercayaan anggota.
- Pembiayaan koperasi masih minim dan belum masuk sistem pembiayaan formal (bankable).
- Belum terintegrasi ke rantai nilai industri atau BUMN.
- Digitalisasi koperasi masih rendah, baik dari sisi pelayanan maupun pencatatan keuangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

RASIO KEWIRAUSAHAAN DAERAH



Catatan:

- Capaian Rasio Kewirausahaan Jawa Barat Semester I Tahun 2026 berdasarkan Sakernas BPS Provinsi Jawa Barat Februari 2026 mencapai 3,30%, yang dihitung dari 886 ribu orang berusaha dibantu buruh tetap dibandingkan dengan total angkatan kerja sebanyak 26,89 Juta orang.
- Upaya peningkatan dilakukan melalui Pendampingan Wirausaha Naik Kelas, Pendidikan dan Pelatihan UMKM, fasilitasi akses pembiayaan, legalitas, sertifikasi, serta perluasan pasar untuk mendorong UMKM berkembang dan menyerap tenaga kerja tetap hingga akhir tahun 2026.

INDIKATOR KINERJA DAERAH

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT

RASIO VOLUME USAHA KOPERASI TERHADAP PDRB

	TARGET	REALISASI
TAHUN 2025	2,85%	2,89%
TAHUN 2026 SM I	3,04%	4,68%*

PROPORSI JUMLAH USAHA KECIL DAN MENENGAH

	TARGET	REALISASI
TAHUN 2025	0,25%	0,26%
TAHUN 2026 SM I	0,27%	0,26%*

* : data bersifat sementara

Catatan:

- Realisasi rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB menggunakan data laporan koperasi sampai dengan Mei 2026.
- Realisasi proporsi usaha kecil dan menengah masih menggunakan capaian tahun 2025, karena program Pendampingan Wirausaha Naik Kelas dan Inkubator Bisnis masih berlangsung.
- Pembaruan aplikasi pendataan sedang disusun dan direncanakan dilaksanakan pada Perubahan Anggaran Tahun 2026.

REALISASI ANGGARAN TA 2026 S.D BULAN JULI

KODE	URAIAN	APBD MURNI 2026	REALISASI S.D JULI	SISA ANGGARAN	% REALISASI
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	47,610,818,313	25,261,875,334	22.348.942.979	53.06
5.1.01	Belanja Pegawai	22,054,422,928	15,414,184,930	6,640,237,998	69.89
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25,556,395,385	9,847,690,404	15,708,704,981	38.53
5.2	BELANJA MODAL	13,499,048,240	1,946,228,350	11,552,819,890	14.42
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,398,000	0	14,398,000	0.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13,484,650,240	1,946,228,350	11,538,421,890	14.43
JUMLAH BELANJA DAERAH		61.109.866.553	27,208,103,684	33,901,762,869	44.52

8 PROGRAM PRIORITAS DINAS KUK T.A 2026



Total Anggaran
28,905 Miliar



Realisasi s.d Juli
6,25 Miliar (21,63%)



Fasilitasi Inkubator Bisnis

Target: 200 UMKM	Realisasi: 100 UMKM
Anggaran: 905 Juta	Realisasi: 142,96 Juta



Penataan UMKM di Jalur
Tangkuban Parahu-Ciater-Tambaksari

Target: 220 Kios	Realisasi: 15 Kios
Anggaran: 20 Miliar	Realisasi: 2,50 Miliar



Pendampingan Wirausaha
Naik Kelas

Target: 1500 UMKM	Realisasi: 1500 UMKM (On Going)
Anggaran: 1 Miliar	Realisasi: 479,58 Juta



Fasilitasi Legalitas dan
Sertifikasi UMKM

Target: 1352 UMKM	Realisasi: 455 UMKM
Anggaran: 1 Miliar	Realisasi: 800,08 Juta



Peningkatan dan
Pelatihan UMKM

Target: 2000 UMKM	Realisasi: 424 UMKM
Anggaran: 3 Miliar	Realisasi: 1,39 Miliar



Pendampingan Koperasi
Merah Putih

Target: 638 KDKMP	Realisasi: 527 KDKMP
Anggaran: 2 Miliar	Realisasi: 626,70 Juta



Pendidikan dan Pelatihan
Perkoperasian

Target: 1763 Orang	Realisasi: 171 Orang
Anggaran: 500 Juta	Realisasi: 138,90 Juta



Fasilitasi Izin, Pengawasan dan
Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

Target: 1288 Koperasi	Realisasi: 1078 Koperasi
Anggaran: 500 Juta	Realisasi: 173,28 Juta

PROGRAM PRIORITAS 1: FASILITASI INKUBATOR BISNIS

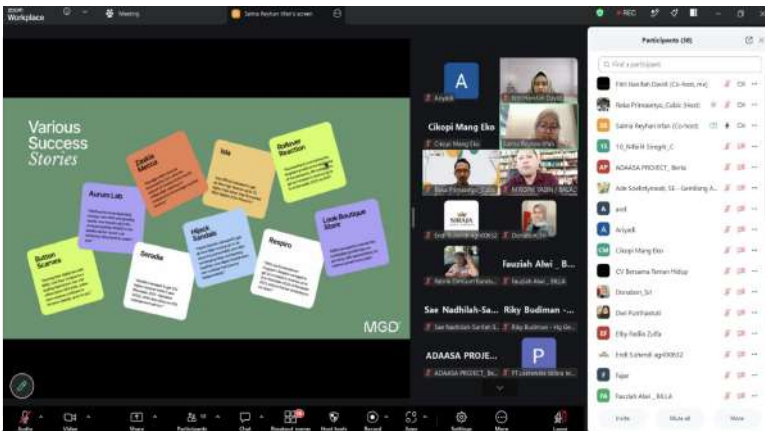
Fasilitasi Inkubator Bisnis merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong wirausaha agar mampu mengembangkan usaha secara lebih terarah, mandiri, dan berkelanjutan melalui rangkaian pembinaan yang mencakup peningkatan kapasitas manajerial, penguatan strategi dan model bisnis, akses permodalan, pendampingan usaha, serta perluasan jejaring dan akses pasar. Pelaksanaan program mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah Provinsi untuk melaksanakan inkubasi dengan cakupan paling sedikit 50 tenant setiap tahun. Di Jawa Barat, Program Strategis Inkubator Bisnis dilaksanakan oleh Delta Inkubator, Lembaga Inkubator Bisnis milik Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang telah berdiri sejak tahun 2023, sebagai wadah pembinaan dan pengembangan tenant melalui proses inkubasi yang terstruktur, mulai dari seleksi dan identifikasi kebutuhan usaha, coaching dan mentoring, peningkatan kapasitas, fasilitasi pembiayaan dan kemitraan, hingga perluasan pasar, dengan tujuan mendorong lahirnya wirausaha yang inovatif, berdaya saing, mandiri, dan berkelanjutan.



Kick Off Inkubator Bisnis Batch 1



Kick Off Inkubator Bisnis Batch 2



Coaching Tenant Bersama Pendamping



Pelaksanaan Workshop Tenant

200

Target tenant tahun 2026

100

Tenant sedang dalam tahap inkubasi

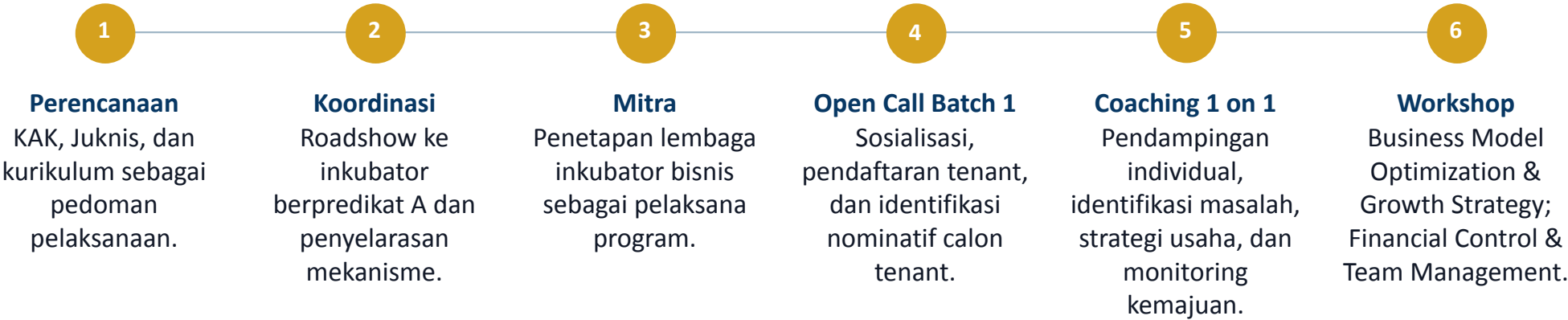
100

Tenant baru akan direkrut melalui *open call* pada Agustus

Peringkat B

Peringkat Delta Inkubator berdasarkan penilaian Kementerian UMKM

Tahapan yang Sudah Dilaksanakan s.d Juli



PROGRAM PRIORITAS 2: PENATAAN UMKM DI KABUPATEN SUBANG

Program Penataan UMKM di Desa Cisaat-Desa Curugrendeng Kabupaten Subang dilaksanakan sebagai Program Prioritas Gubernur Jawa Barat dalam rangka menata kembali keberadaan UMKM yang sebelumnya terdampak penertiban, dengan pendekatan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup penataan lokasi usaha, penyediaan sarana kios bagi pelaku UMKM agar dapat berusaha secara legal dan terorganisir tanpa mengganggu ketertiban kawasan, sekaligus mendukung kenyamanan wisata dan kelestarian lingkungan. Pelaksanaan dilakukan melalui koordinasi lintas pihak, penyiapan dokumen pengadaan dan perencanaan teknis, pemenuhan aspek perizinan, hingga konstruksi kios dan pengawasan pekerjaan. Proses penataan UMKM dilakukan dengan melakukan **Trasnformasi Konsep Menuju Visibilitas Maksimal**:

- Lokasi Strategis:** Unit ditempatkan di pinggir jalan raya untuk memaksimalkan visibilitas komersial
- Konsep Desain:** Mengadopsi “Saung” tradisional
- Integrasi Lingkungan:** Integrasi dengan kebun teh (Lead: Disbun Jabar)
- Prioritas:** Diutamakan bagi pedagang nanas
- Sistem Alokasi:** Prinsip satu kios untuk satu pelaku UMKM

Target

220 Kios

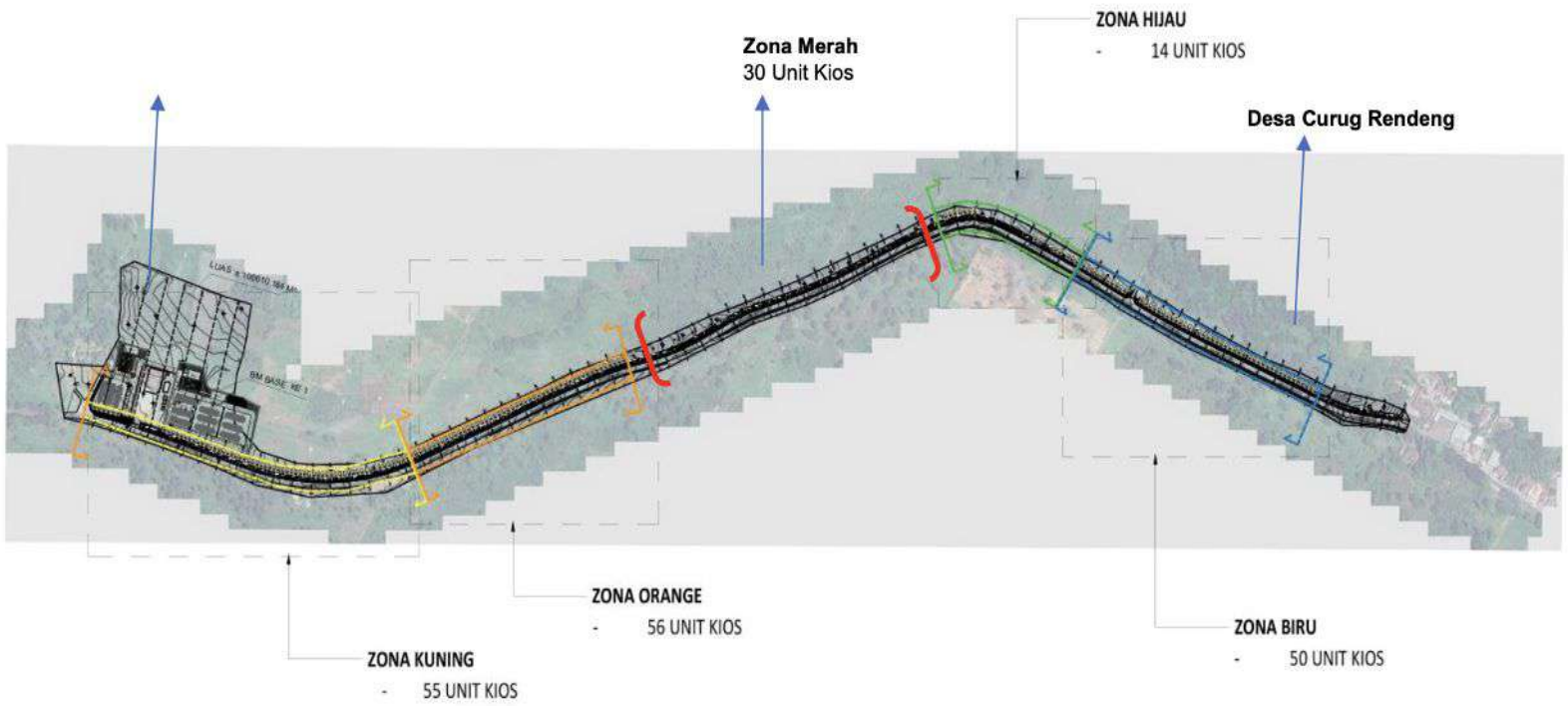
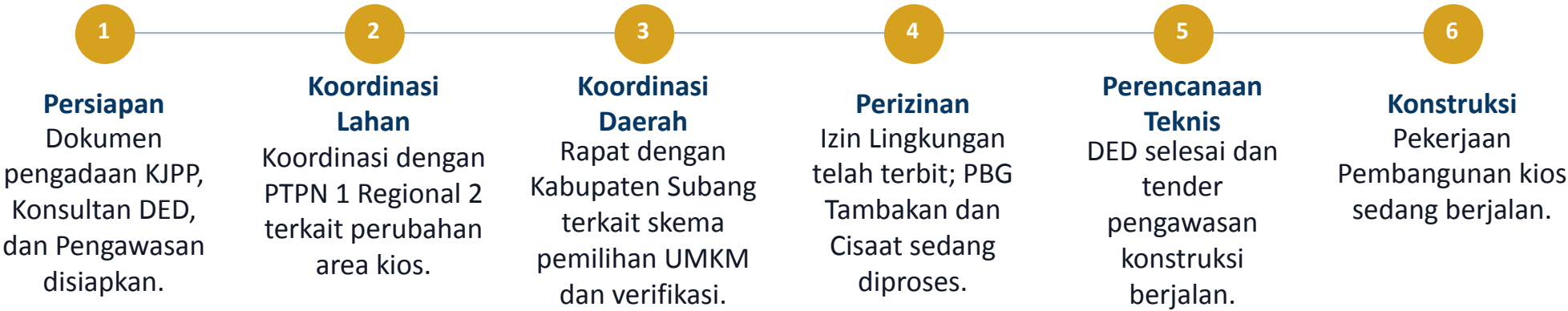
15 Kios

Sudah selesai dibangun

205 Kios

Kios dalam tahap pembangunan

Tahapan yang Sudah Dilaksanakan s.d 10 Agustus



Siteplan Penataan Kawasan UMKM di Cisaat-Curugrendeng



Kios UMKM yang Sudah Dibangun



Proses Pembangunan Kios di Zona Biru

PROGRAM PRIORITAS 3: PENDAMPINGAN WIRAUSAHA NAIK KELAS

Pendampingan Wirausaha Naik Kelas merupakan upaya meningkatkan daya saing UMKM di tengah persaingan ekonomi yang semakin kompetitif, mengingat peran penting UMKM sebagai penggerak ekonomi dan penyerap tenaga kerja, namun masih menghadapi keterbatasan dalam manajerial, permodalan, digitalisasi, dan akses pasar. Oleh karena itu, dilakukan pendampingan intensif selama 6 bulan kepada 1.500 UMKM oleh 85 pendamping, melalui asesmen awal usaha, pendampingan peningkatan kapasitas manajemen dan produksi, fasilitasi legalitas dan perizinan, penguatan branding dan digital marketing, akses pembiayaan, serta perluasan jejaring dan akses pasar guna mendorong UMKM naik kelas secara berkelanjutan.

1.500

Target UMKM peserta program

85

Pendamping UMKM

6 Bulan

Durasi pendampingan intensif dari bulan Mei

27 Kab/Kota

Cakupan pelaksanaan di Jawa Barat

Tahapan yang Sudah Dilaksanakan s.d Juli

1

Evaluasi

Dilakukan evaluasi Program UMKM Naik Kelas Tahun 2025.

2

Juknis

Penyusunan petunjuk teknis dan sosialisasi kepada dinas KUKM kab/kota.

3

Seleksi

Seleksi dan usulan koordinator pendamping daerah serta pendamping UMKM.

4

Konsolidasi

Training of Trainer bagi koordinator dan pendamping UMKM.

5

Profiling

Identifikasi, profiling, dan pemetaan peserta berdasarkan kecamatan.

6

Pendampingan

Kunjungan usaha, fasilitasi izin, pemasaran, pembiayaan, kemitraan, dan mentoring (On Going).



Sosialisasi Program



Training of Trainer Pendamping



Kunjungan Pendampingan UMKM



Mentoring Luring dan Daring

PROGRAM PRIORITAS 4: FASILITASI LEGALITAS DAN SERTIFIKASI UMKM

Fasilitasi Legalitas dan Sertifikasi UMKM merupakan salah satu upaya strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kepastian hukum, keamanan produk, perlindungan konsumen, serta daya saing pelaku UMKM melalui fasilitasi perolehan legalitas dan sertifikasi usaha. Kegiatan ini diarahkan untuk membantu pelaku usaha memenuhi standar dan persyaratan yang dibutuhkan agar produk memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, mampu memperluas akses pasar, serta memiliki peluang yang lebih besar untuk masuk ke jaringan pemasaran modern, kemitraan usaha, maupun pasar yang lebih luas. Ruang lingkup kegiatan meliputi fasilitasi **Sertifikasi Merek bagi 1000 UMKM** sebagai bentuk perlindungan atas identitas dan kekayaan intelektual usaha, **Sertifikasi Halal bagi 350 UMKM** untuk memberikan jaminan kehalalan produk kepada konsumen, serta fasilitasi **HACCP bagi 2 UMKM** sebagai upaya pemenuhan standar keamanan pangan.

353 Merek

Selesai didaftarkan

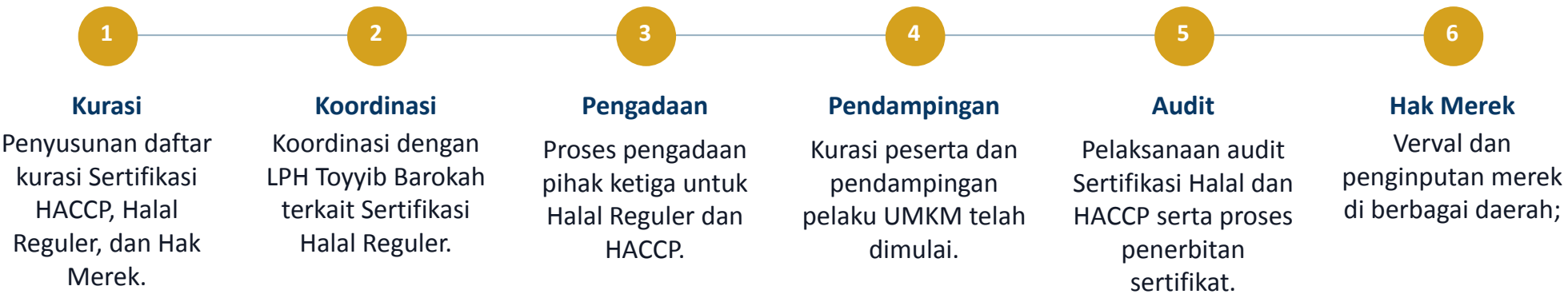
100 Halal

Selesai didaftarkan

2 HACCP

Selesai didaftarkan

Tahapan yang Sudah Dilaksanakan s.d Juli



PROGRAM PRIORITAS 5: PENINGKATAN DAN PELATIHAN UMKM

Kegiatan Peningkatan dan Pelatihan UMKM dilaksanakan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan daya saing pelaku usaha agar mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar serta menghadapi persaingan usaha yang semakin dinamis. Penguatan kompetensi dilakukan melalui rangkaian pelatihan yang disusun berdasarkan kebutuhan aktual pelaku UMKM, meliputi

1. Pelatihan Online Public Speaking dan Afiliator Bisnis
2. Pelatihan Wirausaha Baru
3. Pelatihan UMKM Naik Kelas

Pada akhir bulan Juli, telah dilaksanakan Pelatihan Online Public Speaking dan Afiliator Bisnis, Pelatihan Wirausaha Baru dan juga Pelatihan UMKM Naik Kelas dengan total peserta sebanyak 821 UMKM dan masih berlanjut. Selanjutnya secara bertahap akan dilaksanakan Pelatihan Wirausaha Baru bagi UMKM sebanyak 13 Batch.



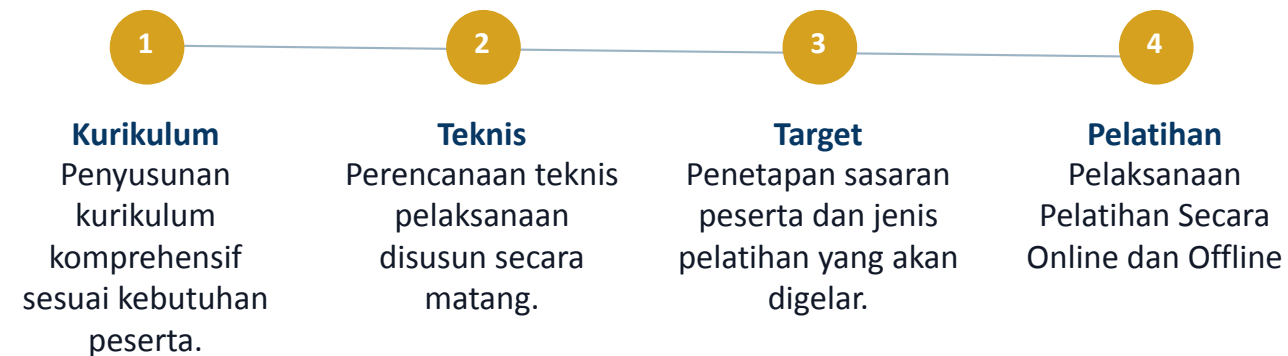
**Target
2000 UMKM**

**Realisasi
812 UMKM**

**Target
21 Batch**

**Realisasi
8 Batch**

Tahapan yang Sudah Dilaksanakan s.d Juli



PROGRAM PRIORITAS 6: PENDAMPINGAN KOPERASI MERAH PUTIH

Pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan **Program Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**, khususnya dalam memastikan koperasi yang baru dibentuk dapat tumbuh dan beroperasi secara sehat, akuntabel, serta berkelanjutan. Mengingat sebagian besar koperasi tersebut masih berada pada tahap awal pembentukan dan pengembangan kelembagaan, diperlukan pendampingan dan pengawasan secara intensif untuk memperkuat kapasitas pengurus, pengawas, dan pengelola dalam aspek tata kelola, legalitas dan administrasi, pengelolaan unit usaha, pencatatan dan pelaporan keuangan, serta pengembangan jejaring usaha dan kemitraan. Melalui dukungan pendampingan dan pengawasan yang terarah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat memastikan Koperasi Merah Putih mampu menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan, memberikan pelayanan yang optimal kepada anggota dan masyarakat, serta berkembang menjadi kelembagaan ekonomi desa dan kelurahan yang mandiri dan berdaya saing.



527 KDKMP

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang difasilitasi usaha koperasi

1.663 Gerai

Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah dibangun

10 Bulan Pendampingan

2.754

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah melaksanakan RAT

Tahapan yang Sudah Dilaksanakan s.d Juli

1

Koordinasi

Sinergi dengan dinas kabupaten/kota dan pemangku kepentingan terkait.

2

Pemetaan

Inventarisasi data koperasi dan identifikasi kebutuhan pendampingan.

3

Kelembagaan

Pendampingan legalitas, administrasi, dan tata kelola koperasi.

4

Usaha

Identifikasi potensi usaha serta penataan model bisnis koperasi.

5

Pembinaan

Pendampingan manajerial, pencatatan, operasional, dan pemasaran.

6

Monitoring

Evaluasi kemajuan dan penyusunan tindak lanjut perbaikan.

Keterangan :

1. Data Gerai KDKMP yang sudah dibangun berdasarkan data dari portal PT. Agrinas per 5 Agustus 2026
2. Data Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berdasarkan Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi per 31 Juli 2026
3. Data Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang difasilitasi peningkatan usaha, akses permodalan dan digitalisasi berdasarkan data Bidang Pemberdayaan Koperasi diolah per 31 Juli 2026

PROGRAM PRIORITAS 7: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN

Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme pengurus koperasi, khususnya dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha koperasi yang akuntabel dan berdaya saing. Ruang lingkup kegiatan meliputi Pelatihan Melaksanakan RAT Koperasi bagi KDKMP, Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK-EP, Pelatihan Koperasi Syariah, Pelatihan Perkoperasian Berbasis Kompetensi serta Uji Kompetensi bagi Pengurus. Sampai dengan Juli 2026, telah dilaksanakan Pelatihan melaksanakan RAT bagi KDKMP dan juga Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAK-EP bagi Koperasi Se - Jawa Barat dengan total peserta sebanyak 171 Peserta.

4 Jenis

Rumpun kegiatan pelatihan perkoperasian

171 Peserta

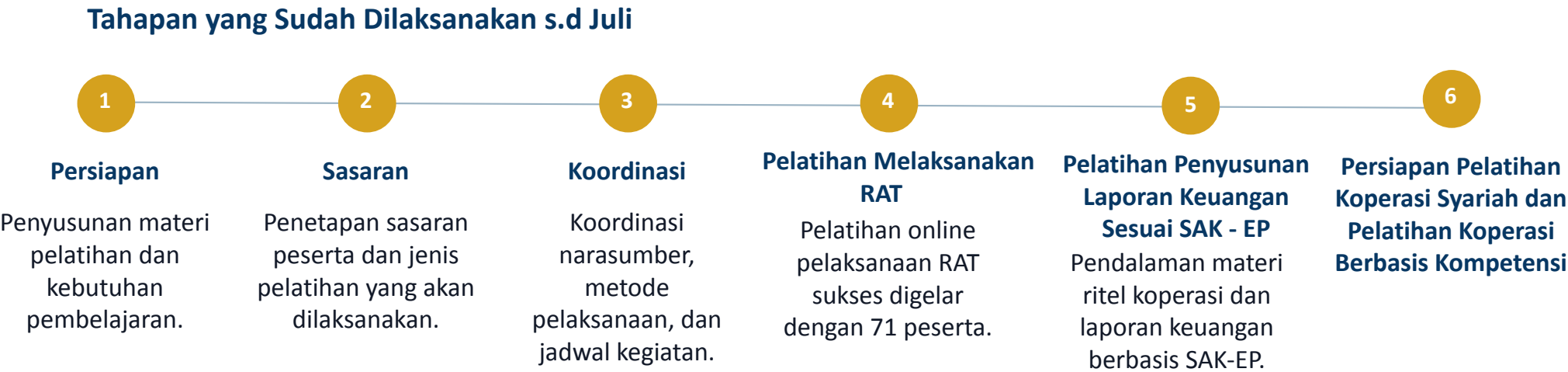
Pelatihan Melaksanakan RAT dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan

Online & Offline

Pelatihan awal telah terselenggara

Akuntabel

Fokus pada tata kelola dan transparansi



Persiapan Uji Kompetensi Pengurus Koperasi

PROGRAM PRIORITAS 8: FASILITASI IZIN, PENGAWASAN & PEMERIKSAAN KESEHATAN KOPERASI

Fasilitasi Izin, Pengawasan, dan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan memastikan koperasi beroperasi secara legal, sehat, dan sesuai dengan prinsip serta peraturan perkoperasian yang berlaku. Kegiatan ini meliputi fasilitasi proses perizinan koperasi guna mendorong kemudahan akses legalitas dan peningkatan kepatuhan administrasi, pengawasan berkala terhadap aspek kelembagaan, usaha, dan keuangan koperasi untuk memastikan tata kelola yang baik, serta pemeriksaan kesehatan koperasi berdasarkan indikator tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan. Melalui kegiatan ini, koperasi diharapkan semakin tertib, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

246 Koperasi

Didampingi pemenuhan perizinan

61 Koperasi

Dilakukan pengawasan koperasi

148 Koperasi

Dilakukan pemeriksaan Kesehatan koperasi

623 Koperasi

Dilakukan Pendampingan Pemenuhan Tata Kelola

Tahapan yang Sudah Dilaksanakan s.d Juli

1

Perizinan

Pendampingan izin usaha koperasi sesuai ketentuan yang berlaku.

2

Jaringan Kantor

Pendampingan perizinan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi.

3

Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan terhadap aspek kelembagaan, usaha, dan keuangan.

4

Penilaian

Pengawasan dan penilaian kepatuhan terhadap AD/ART, RAT, dan administrasi.

5

Pemeriksaan

Pemeriksaan kesehatan berdasarkan tata kelola, risiko, keuangan, dan permodalan.

6

Tindak Lanjut

Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan tata kelola koperasi.



Pendampingan Perizinan Koperasi



Verifikasi Dokumen Koperasi



Pelaksanaan Pengawasan Koperasi



Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

STRUKTUR ANGGARAN DINAS KUK PADA PERUBAHAN KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	APBD MURNI 2026	RANCANGAN PERUBAHAN KUA-PPAS 2026	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	47,610,818,313	50,556,988,383	2,946,170,070	6.19
5.1.01	Belanja Pegawai	22,054,422,928	25,100,592,998	3,046,170,070	13.81
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25,556,395,385	25,456,395,385	-100,000,000	-0.39
5.2	BELANJA MODAL	13,499,048,240	12,046,277,110	-1,452,771,130	-10.76
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,398,000	14,398,000	0	0.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13,484,650,240	12,031,879,110	-1,452,771,130	-10.77
JUMLAH BELANJA DAERAH		61.109.866.553	62,603,265,492	1,493,398,939	2.44

USULAN KEBUTUHAN PENAMBAHAN ANGGARAN YANG BELUM TERAKOMODIR PADA PERUBAHAN APBD TA 2026 **Rp. 1.846.563.694**

1

Perbaikan/Pemeliharaan Tangga Akses Utama Gedung Dinas

Rp200.000.000

Kondisi tangga utama rusak dan tidak dapat digunakan, sehingga akses pegawai dan masyarakat ke lantai atas sementara hanya melalui tangga darurat.

Kebutuhan ini bersifat mendesak untuk memulihkan akses utama layanan publik, meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna gedung, serta menjaga kelayakan sarana prasarana pemerintah daerah. Penggunaan tangga darurat sebagai akses harian tidak ideal karena jalur tersebut pada dasarnya diperuntukkan untuk kondisi evakuasi. Perbaikan diusulkan agar mobilitas pegawai dan masyarakat kembali berjalan normal serta risiko keselamatan dapat diminimalkan.

Dokumentasi Kondisi Fisik



2

Kekurangan Belanja Gaji PPKL Masa Transisi PPPK Paruh Waktu

Rp368.658.794

PPKL berjumlah 45 orang sedang dalam masa transisi pengangkatan PPPK Paruh Waktu dan tetap dibutuhkan untuk pendampingan koperasi di lapangan.

Skema pembiayaan perlu disesuaikan menjadi outsourcing sesuai arahan BPKAD, sehingga muncul kebutuhan management fee yang belum diperhitungkan pada APBD Murni. Anggaran tersedia hanya cukup sampai Oktober 2026, sehingga diperlukan tambahan untuk November-Desember. Tanpa dukungan ini, pendampingan koperasi berisiko terhenti dan target pembinaan terganggu.

3

Penambahan Fasilitas Sertifikasi Halal bagi 250 UMKM

Rp827.904.900

APBD Murni baru mengakomodasi 100 UMKM dari target 350 UMKM, sehingga masih dibutuhkan fasilitas untuk 250 UMKM.

Dukungan ini diperlukan untuk percepatan pemenuhan kewajiban sertifikasi halal, sejalan dengan ketentuan penahapan sampai 17 Oktober 2026. Sertifikasi halal menjadi kebutuhan regulatif sekaligus instrumen peningkatan daya saing, kepercayaan konsumen, dan perluasan akses pasar produk UMKM Jawa Barat.

4

Penambahan Fasilitas Sertifikasi Merek bagi 500 UMKM

Rp450.000.000

APBD Murni baru mengakomodasi 500 UMKM dari target 1.000 UMKM, sehingga masih terdapat kebutuhan fasilitas bagi 500 UMKM.

Perlindungan merek penting untuk kepastian hukum usaha, penguatan identitas produk, peningkatan kepercayaan konsumen, peluang kemitraan, dan pencegahan sengketa merek. Penambahan anggaran diarahkan untuk mempercepat perlindungan kekayaan intelektual UMKM serta memperkuat ekosistem usaha kecil yang berdaya saing.

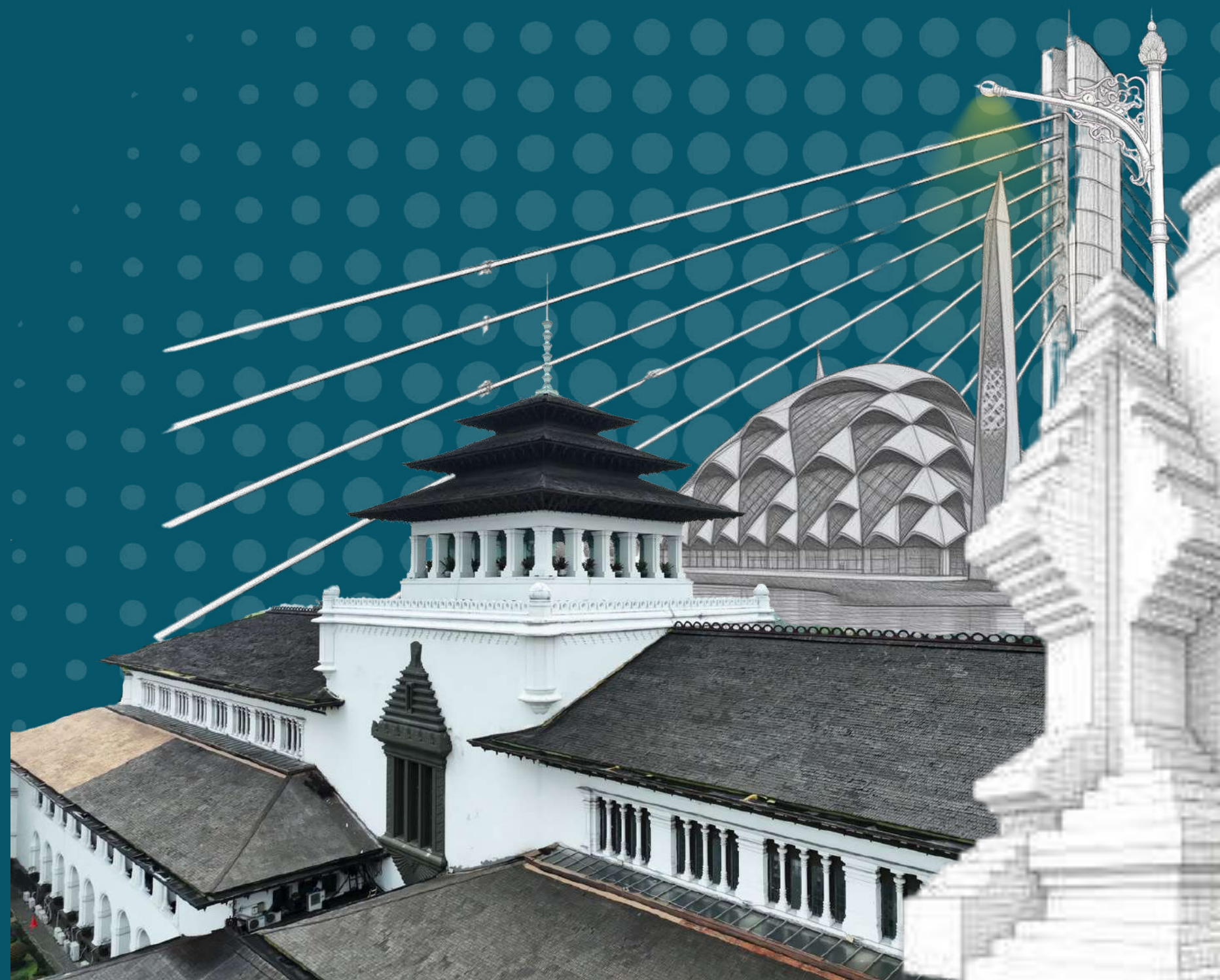


Pemerintah Provinsi
Jawa Barat

Jabar
Istimewa
Hampung Diurus, Kota Ditata

TERIMA KASIH

Jl. Soekarno Hatta Nomor 705
Kota Bandung, Jawa Barat - 40286
Email : diskumkm@jabarprov.go.id



ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan rincian 8 Program, 16 Kegiatan, dan 48 Subkegiatan

Semula

Rp. 200,000,000,-

Menjadi

Rp. 200,000,000,-

PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Rp.200.000.000,-

Kegiatan:

Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan: Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Kegiatan:

Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Semula

Rp. 200,000,000,-

Menjadi

Rp. 200,000,000,-

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Rp.200.000.000,-

Kegiatan:

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan: Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

Kegiatan:

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan rincian 8 Program, 16 Kegiatan, dan 48 Subkegiatan

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Rp.100.000.000,-

Kegiatan:

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan: Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

Semula

Rp. 100,000,000,-

Menjadi

Rp. 100,000,000,-

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Rp. 2,080,000,000,-

Kegiatan:

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
2. Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
3. Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
4. Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
5. Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
6. Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Semula

Rp. 2,080,000,000,-

Menjadi

Rp. 2,080,000,000,-

ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan rincian 8 Program, 16 Kegiatan, dan 48 Subkegiatan

PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Rp. 16,075,028,870,-

Kegiatan:

Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
Sub Kegiatan:

1. Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
2. Pemulihan Usaha-Usaha Kecil
3. Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Penyusunan Basis Data Usaha Kecil
5. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
6. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil
7. Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha

Semula

Rp. 17,527,800,000,-

Menjadi

Rp. 16,075,028,870,-

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Rp. 1,965,000,000,-

Kegiatan:

Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

Sub Kegiatan:

1. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
2. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM
3. Pengembangan Usaha Kecil
4. Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
5. Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil

Semula

Rp. 1,965,000,000,-

Menjadi

Rp. 1,965,000,000,-

ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan rincian 8 Program, 16 Kegiatan, dan 48 Subkegiatan

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Rp. 500,000,000,-

Kegiatan:

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Semula

Rp. 500,000,000,-

Menjadi

Rp. 500,000,000,-

PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Rp3,000,000,000,-

Kegiatan:

Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan

Semula

Rp3,000,000,000,-

Menjadi

Rp3,000,000,000,-

ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan rincian 8 Program, 16 Kegiatan, dan 48 Subkegiatan

DINAS

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **Rp. 36,053,194,691,-**

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Semula

Rp.33.137.410.001,-

Menjadi

Rp. 36,053,194,691,-

ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan rincian 8 Program, 16 Kegiatan, dan 48 Subkegiatan

UPTD

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** Rp. 2,430,041,932,-

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Semula

Rp. 2,399,656,552,-

Menjadi

Rp. 2,430,041,932,-